

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH
DI DESA LARANGAN GLINTONG KLAMPIS BANGKALAN**

SKRIPSI

**Oleh:
Zainal Akbar
NIM. C92217188**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Zainal Akbar
Tempat/Tgl Lahir : Bangkalan, 07 Juli 1999
NIM : C92217188
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 01 Juli 2021

Penulis,



Zainal Akbar
NIM. C92217188

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Akbar NIM. C92217188 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 01 Juli 2021
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Ufuqul Mubin', written in a cursive style.

Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin.
NIP: 1973307262005011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zainal Akbar NIM. C92217188 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 15 Juli tanggal 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Dr. M. Ufuqul Mubin
NIP. 1973307262005011001

Penguji II



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III



Dr. Achmad Fageh, M.HI
NIP. 197306032005011004

Penguji IV



Miftakhur Rokhman Habibi, MH
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 15 Juli 2021
Mengesahkan.
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zainal Akbar
NIM : C92217188
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : zainalakbar07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PRAKTIK GADAI SAWAH DI DESA LARANGAN GLINTONG KLAMPIS
BANGKALAN**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2021

Penulis

()
Zainal Akbar

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil metode kualitatif atau dengan penelitian lapangan. Skripsi ini guna untuk menjawab rumusan masalah bagaimana praktik gadai sawah di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan dan bagaimana analisis hukum Islam dan Kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini tergolong jenis penelitian lapangan yang ditujukan di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis dan data penelitian ini dihimpun dari proses observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian hasil data yang dihimpun, dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu memaparkan landasan teori tentang Gadai dalam hukum Islam dan KHES pada pasal 396, selanjutnya dipakai untuk meninjau dan menganalisis praktik gadai barang dengan berupa sawah yang kemudian dimanfaatkan oleh penerima gadai di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan untuk mengetahui status hukumnya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, sudah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat ditinjau dari hukum Islam, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa praktik gadai yang dilakukan sudah dipandang sah dan jelas, karena adanya pihak yang bertransaksi yakni pemberi gadai dan penerima gadai (*aqid*), adanya ijab dan qabul adanya barang yang akan dijadikan jaminan hutang yang memiliki nilai jual dan nilai tukar pengganti barang. Kedua, disebutkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, praktik gadai Masyarakat Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan ini, tidak sah karena dalam akadnya tidak memenuhi syarat *siġhat*, yakni transparansi dalam *siġhat* yang kurang jelas, dan juga pada pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba. Namun menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat pada Pasal 396, bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak boleh dilakukan karena tidak ada izin dari pemberi gadai, walaupun hal demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tetap tidak boleh dilakukan karena sudah sesuai hukum yang berlaku.

Atas Kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis berharap segala tindakan yang dilakukan masyarakat umum, untuk bagaimana memahami dan menaati hukum yang berlaku, khususnya masyarakat Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum seperti pemanfaatan barang gadai yang tanpa izin pemilik barang gadai. Kemudian penulis juga menyarankan agar dapat pula memahami bagaimana menjalankan praktik gadai tersebut yang sesuai dengan hukum atau syariat Islam.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	19
F. Manfaat Penelitian	19
G. Definisi Operasional.....	20
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan	29
BAB II.....	32
A. Tentang Gadai	32
1. Pengertian Gadai	32
2. Dasar Hukum Gadai <i>rahj'n</i>	34
3. Syarat dan Rukun Gadai.....	36
4. Pandangan Ulama' Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai.....	42
5. Berakhirnya Akad Gadai	45
B. Dinamika Pembahasan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	47
1. Terbitnya Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	47
2. Pemberlakuan Hukum Muamalat (KHES).....	51
3. KHES Sebagai Fiqih Ke-Indonesia-an	54
4. Sumber-Sumber KHES	56
BAB III.....	58
A. Gambaran Umum Geografis Desa Larangan Glintong Klampis	58
2. Kondisi Demografi Desa Larangan Glintong.....	59
3. Keadaan Penduduk Sosial Ekonomi.....	59
4. Pendidikan	60
5. Agama	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. Sebagai makhluk sosial yang dimana tidak bisa lepas dari interaksi sosial di lingkungan sekitar maupun diluar. Dalam implementasi sosialnya mereka hidup antara satu sama lain dan saling membutuhkan. Dalam ajaran Islam istilah hubungan antar manusia biasa disebut (*habluminannas*) yang merupakan nilai-nilai yang mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan antar manusia dan bertujuan untuk tercapainya kehidupan yang harmonis.¹ Nilai tersebut mencakup masalah Muamalah. Muamalah sendiri ialah hubungan antar kepentingan manusia dimana dalam hubungan tersebut adanya sebuah komunikasi yang menyangkut sebuah hal yang berkaitan dengan bidang ekonomi.² Muamalah bertujuan untuk menjaga keharmonisan interaksi sosial antara manusia satu dengan yang lainnya, maka dari itu Muamalah sangatlah berperan penting dalam kehidupan sehari-hari kita.

Adanya interaksi hubungan satu dengan yang lainnya akan membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan hidup bermasyarakat. Di tengah kehidupan bermasyarakat hendaknya kita harus berbuat baik satu sama lain, demi terciptanya kenyamanan, kerukunan, dan ketenteraman bagi kita semua. Dengan menjaga ketaatan hukum syariat islam yang

¹ Nurul Ilmi Idrus, “ETNOSIA Jurnal Etnografi Indonesia”, *Jurnal Etnosia*, Vol. 01. No. 02, (Desember, 2016), 70.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), 7.

Banyak kegiatan Muamalah yang terjadi di tengah masyarakat yang sering kita jumpai seperti gadai, jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, kerja sama dan lainnya. salah satunya ialah gadai, dalam Islam gadai biasa dikenal dengan istilah *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* ialah suatu kegiatan gadai yang dimana menjadikannya suatu barang berharga sebagai jaminan hutang kepada pemberi hutang. Pemilik barang gadai disebut *raḥīn* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahīn*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *rahn*.¹

Praktik Gadai yang dimana sudah menjadi Kebiasaan atau istilah Islam nya lebih dikenal *Al-'urf* yang merupakan sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan ataupun perbuatan atau hal-hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Karna menurut istilah ahli syarak tidak ada perbedaan antara *Al-'urf*

[illegible]

Salah satu cara alternatif untuk menciptakan mutu perekonomian masyarakat agar terpenuhi ialah praktik “gadai”, di masyarakat sering dikenal bahwa gadai tidak hanya dilakukan di sebuah Lembaga Pegadaian baik itu pegadaian Syariah ataupun Pegadaian Konvensional. Bahkan

³ Bpk. Siroj Nawawi (Warga Desa Larangan Glintong) *Wawancara*, Bangkalan. 28 November 2020, Pukul 15.25 WIB.

Kecamatan Klampis ini adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Bangkalan. kecamatan Klampis terdiri dari beberapa desa yaitu : (Desa Bantean, desa Bator, desa Brang, desa Bulukagung. desa karang asem, desa bulung, desa Klampis timuur, desa Klampis barat desa ko'ol, desa larangan glintong, desa larangan sorjan, desa lergunong, desa manunggal, desa mrandung, desa moarah, desa penyaksaghen, desa polongan, desa ra'as, dsa tnggun, desa tobaddung, dsa trogan, desa tolbuk).⁵ ada umumnya, Masyarakat di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak.

⁵ Bpk. Ibnu Nawawi (Warga Desa Klampis Timur) *Wawancara*, Bangkalan, 27 November 2020, Pukul 14.30 WIB.

Karena di Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis bisa dikatakan memiliki aset tanah yang cukup berkualitas dalam segi produktifitas. Gadai sawah sudah kerap terjadi di masyarakat setempat, Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis lebih menonjol segi agrarisnya daripada Desa lainnya yang berada di satu Kecamatan yaitu Kecamatan Klampis. Maka dari itu disana menjadi salah satu alasan pergadaian sawah masih tetap dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Glintong.

Masyarakat di Desa Larangan Glintong biasanya mereka menggadaikan sawahnya kepada kerabat, tetangganya sendiri atau dengan masyarakat desa setempat supaya lebih mudah aman dan cepat dalam prosesnya, dan juga dikarenakan sudah saling mengenal satu sama lain dan mengerti sifat atau watak lawan transaksinya tersebut. Dan tak lupa mereka juga melakukan kesepakatan tertentu antara kedua belah pihak tersebut. Sehingga lebih menjamin dalam segi keamanan suatu transaksi dan dapat meminimalisir potensi penipuan antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Praktik gadai yang dilakukan warga setempat yang dimana Sawah tersebut yang telah menjadi barang jaminan penerima hutang terhadap pemberi hutang kini berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai tenggang waktu pelunasan hutang oleh penerima hutang, Namun kadang tidak ada kesepakatan tenggang waktu terkait pelunasan hutang, hanya saja mereka menggunakan asas kepercayaan antar kerabat ataupun tetangga. Selama berada ditangan pemberi hutang hasil panen yang melimpah dari

sawah pun menjadi hak penuh si pemberi hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun sehingga hasil keuntungan pengelolaan sawah tersebut lebih besar dari nilai hutang yang dipinjamkan, dan pada saat transaksi gadai itu dilaksanakan antara pemberi hutang dan penerima hutang tidak mendatangkan saksi, karena mereka kedua belah pihak masing-masing sudah saling percaya.

Terdapat sebuah hikmah dari praktik gadai sendiri kita dapat mengambil salah satu contoh peristiwa ialah misalnya, masing-masing nasib seseorang pastinya berbeda, ada yang miskin ada pula yang kaya. Namun terkadang pada suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun keperluan yang sekiranya mendesak. Kebetulan pada saat itu juga, ia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya. Tapi ia masih mempunyai barang berharga, sehingga ia mendatangi orang lain untuk menggadaikan barang tersebut kepada calon pemberi hutang. Dengan demikian mereka kedua belah pihak telah melakukan akad dan saling menyetujui kesepakatan terkait jumlah nominal uang yang ia butuh dan tenggang waktu pelunasan. Terjadilah akad gadai yang dilakukan kedua belah pihak dengan ketentuan yang saling disepakati, sehingga dengan adanya akad gadai ini tercapailah suasana keharmonisan serta kerukunan dengan adanya sikap saling bantu membantu sesama manusia dan berujung ketenteraman

Berdasarkan penjelasan dari Latar belakang diatas terdapat beberapa masalah yang akan diidentifikasi, Dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum Islam yang masih minim di masyarakat setempat
2. Kurang maksimalnya implementasi teori hukum islam yang telah ada
3. Pemahaman masyarakat yang masih awam terkait kompilasi hukum ekonomi syariah
4. Telah Menjadikannya sebuah tradisi turun temurun (*Al-'urf*) di desa setempat
5. Penerapan Akad yang kurang diperhatikan oleh penerima hutang dan pemberi hutang dalam akad tersebut.

[illegible]

Rumusan masalah merupakan masalah yang perlu dianalisa untuk memunculkan sebuah solusi, Beberapa Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- #### D. Kajian Pustaka

Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang “praktik gadai” yang di teliti oleh peneliti terdahulu, diantaranya ialah, oleh ;

Terdapat perbedaan antara keduanya yakni, secara objek peneliti membahas tentang gadai motor, sedangkan penelitian peneliti membahas objek gadai lahan pertanian (sawah). Penelitian ini tidak memuat terkait kompilasi hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian peneliti memuat kompilasi hukum ekonomi syariah yang mengatur tentang gadai. pada pembahasan penelitian lebih fokus terhadap estimasi waktu gadai, sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada pemanfaatan objek gadai.

- Pada tahun 2016 oleh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga⁸. Penelitian yang dilakukan oleh Dina amaliya hidayati dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian

⁸ Dina Amaliya Hidayati, “Pemanfaatan gadai tanah sawah di desan Sruwen, kec, Tenganan, kab. Semarang menurut hukum islam” (*Skripsi--IAIN Salatiga*, 2016).

Perbedaan dari kedua penelitian tersebut ialah, penelitian ini dalam pembahasan teori hukumnya hanya mencantumkan hukum Islam (alquran, hadits, dan ijmak). sedangkan penelitian penulis selain mencantumkan hukum Islam juga menyertakan kejelasan teori kompilasi hukum ekonomi syariah. Pembahasan lebih focus terhadap deskripsi praktik, dan deskripsi objek gadai yang kurang spesifik.

- ⁹ Erna Yanti, “Tinjauan hukum islam terhadap sistem gadai tanah di kec. Tawamangu” (*Skripsi--Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016*).

6. Kholisatul lailiyah, dengan judul “*Studi komparatif faedah gadai dengan kitab Fathul Mu'in terhadap masalah pemanfaatan objek gadai di desa Sansingrowo kecamatan Soko kabupaten Tulungagung*” tahun 2016 oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Kholisatul lailiyah dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, memiliki persamaan pembahasan terkait sistem gadai, yaitu spesifik kearah jenis objek gadai dan pemanfaatan objek gadai, memiliki persamaan dalam tahapan kajian yakni analisa hukum

6. Kholisatul lailiyah, dengan judul “*Studi komparatif faedah gadai dengan kitab Fathul Mu'in terhadap masalah pemanfaatan objek gadai di desa Sansingrowo kecamatan Soko kabupaten Tulungagung*” tahun 2016 oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Kholisatul lailiyah dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, memiliki persamaan pembahasan terkait sistem gadai, yaitu spesifik kearah jenis objek gadai dan pemanfaatan objek gadai, memiliki persamaan dalam tahapan kajian yakni analisa hukum

6. Kholisatul lailiyah, dengan judul “*Studi komparatif faedah gadai dengan kitab Fathul Mu'in terhadap masalah pemanfaatan objek gadai di desa Sansingrowo kecamatan Soko kabupaten Tulungagung tahun 2016* oleh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.”¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Kholisatul lailiyah dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, memiliki persamaan pembahasan terkait sistem gadai, yaitu spesifik kearah jenis objek gadai dan pemanfaatan objek gadai memiliki persamaan dalam tahapan kajian yakni analisa hukum

9. Daih Akhidzu Mafazan dengan judul, *“Pemanfaatan barang jaminan tanah oleh penerima gadai dalam perjanjian hutang piutang perspektif Fiqih empat mazhab.”* Pada tahun 2019 oleh mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Daih Akhidzu Mafazan dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Penelitian yang dilakukan oleh Daih Akhidzu Mafazan dengan penelitian peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, keduanya memiliki persamaan pembahasan terkait sistem gadai, yakni peralihan penguasaan objek gadai lebih tepatnya pembahasan spesifik kearah jenis objek gadai dan pemanfaatan objek gadai.

Perbedaan antara keduanya adalah, terdapat perbedaan pada pisau analisis yang digunakan yakni penelitian ini menggunakan pisau analisis empat mazhab fiqh. sedangkan peneliti menggunakan analisis hukum Islam dan kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam Pengambilan data dan Pembahasan pada penelitian ini lebih fokus pada perbandingan pendapat antara 4 mazhab fiqh.

[illegible]

[illegible]

sedangkan peneliti menyertakan analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menyelaraskan apa yang telah di kutip di bagian rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji praktik gadai sawah di desa Larangan Glintong kec. Klampis, kab. Bangkalan.
2. Mengetahui dan mengkaji analisa hukum Islam dan Kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai sawah di desa larangan glintong, kec. Klampis, kab. Bangkalan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pembaca skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis, dari apa yang telah di deskripsikan dalam sub bab latar belakang dan rumusan masalah, diantaranya :

1. Aspek teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sumbangsih pengetahuan terhadap perkembangan teori hukum islam maupun kompilasi hukum ekonomi syari'ah terkait perihal tentang akad gadai pada khususnya dan khazanah keilmuan pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian yang horizontal maupun vertikal.¹⁶

KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) ialah kumpulan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, dan sebagai pedoman prinsip syari'ah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁷

Praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Larangan Glintang berbeda dengan apa yang ada pada umumnya, yakni jenis praktik yang dilakukan ialah pemanfaatan barang gadai. Barang gadai yang dipegang oleh pemberi hutang tersebut dimanfaatkan dengan mengolahnya, dan pemilik sawah pun tidak mendapat keuntungan sepersen pun dari penghasilan pengelolaan objek gadai tersebut.

¹⁷ Direktoato jenderal Badan Peradilan Agama Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. xii.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data.²³ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

²³ Burhan bungin, *Metodologi penelitian sosial & ekonomi...*, 224.

b. Wawancara

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bersifat fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam bentuk penelitian kualitatif, baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁴ Teknik ini digunakan untuk melihat semua apa saja yang terjadi di lapangan. Mulai dari deskripsi objek sampai dengan pengelolaan dan penghasilan yang di dapatkan pemberi hutang. Dari hasil observasi ini peneliti bisa menemukan beberapa fakta di lapangan bahwa memang bena adanya terkait pemanfaatan objek gadai untuk kepentingan pribadinya yang dimana telah terjadi di lapangan.

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua orang atau lebih, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²⁵ dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung sesuai dengan terkait pembahasan pada penelitian ini yaitu, pihak penerima hutang, pihak pemberi hutang, dan beberapa masyarakat setempat, serta

²⁵ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 180.

kepala desa Larangan Glintong selaku kepala pemerintahan di
Desa Larangan Glintong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan atatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu, dan biasanya dokumen tersebut berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.²⁶ dalam hal ini peneliti akan mengambil data berupa dokumen-dokumen lewat dokumentasi yakni meliputi profil desa, kondisi penduduk, dan foto-foto yang berkaitan dengan objek gadai sawah yang ada di Desa Larangan Glintong.

3. Teknik Pengelolaan Data

Semua data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data selanjutnya akan di kelola melalui tahapan-tahapan pengelolaan data sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data yang ada dari berbagai segi, yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁷ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang telah didapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

²⁶ Muri yusuf, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, & penclitan gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 391.

²⁷ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83.

b. *Organizing* adalah menyusun data-data hasil *editing* dengan sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang terstruktur dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pembaca.²⁹ Dalam menggunakan teknik ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun dan mengelompokkan data yang diperoleh.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian ini, dengan menggunakan teori dan literature lainnya sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik gadai sawah di Desa Larangan Glintong kec. Klampis, kab. Bangkalan.

[illegible]

²⁹ Andi Praswoto, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 210.

a. Reduksi Data

b. Penyajian Data

³⁰ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: alfabetta, 2012), 244.

³² Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif...*, 249.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

I. Sistematika Pembahasan

Pertama, bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah,

[illegible]

Kedua, pada bab ini akan memuat tentang penjelasan lebih luas mengenai pengertian gadai, syarat-syarat sah gadai, landasan-landasan teori hukum pada judul skripsi ini, baik itu teori hukum islam ataupun teori kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 396 tentang pemanfaatan barang gadai, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, *al ‘urf* dan hikmah gadai.

Keempat, pada bab keempat ini menjelaskan tentang analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pada Sawah di Desa Larangan Glintong kec. Klampis, kab. Bangkalan yang dimana sudah di jelaskan pada bab II dan dibenturkan dengan hasil temuan-temuan lapangan yang ada pada bab III agar sesuai dengan dasar Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan nantinya akan menghasilkan justifikasi hukum dalam bab ini.

kelima, pada bab terakhir ini merupakan bab penutup yang akan memuat kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan mulai bab I sampai bab

KONSEPSI TEORITIK GADAI

Menurut para ulama tentang pengertian gadai *rahn* , tidak satu dalam pemikiran, namun banyak pengertian yang tentunya membawa pengertian secara objektif:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, Gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.²
- b. Menurut Syafi'I Antonio gadai (*ar-rahn*) adalah suatu akad dimana seseorang menahan salah satu benda atau harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.³ Artinya dalam hal ini, orang yang meminjam *rahn* harus memberikan atau menyediakan barang yang dimilikinya untuk dijadikan jaminan atas hutangnya kepada orang yang memberi pinjam (*murtahin*).

Berdasarkan pengertian yang di jelaskan diatas, dapat di katakana bahwa gadai *rahn* adalah menahan barang jaminan yang berbentuk materiil isi peminjam *rahn* sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barangnya yang diterima itu bersifat ekonomis, sehingga pihak yang menahan barang (*murtahn*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*,..., 182.

gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar hutangnya pada waktu yang ditentukan.

2. Dasar Hukum Gadai *rahn*

Dalam menjalankan aktivitas gadai, tentunya setiap manusia harus mengetahui dasar hukum daripada gadai tersebut, maka hal ini yang menjadi dasar hukum sebagai tumpu tindakan adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijma' para ulama, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Tolak ukur dalam menjalankan aktifitas gadai sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu: QS. Al-Baqarah ayat 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضٌ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّمًا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang ber piutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mepercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menuaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahuiapa yang kamu kerjakan”. (Q.S. al-Baqarah: 283).

Dari ayat di atas menjelaskan, apabila transaksi itu terjadi dalam perjalanan atau bermuamalah tidak secara tunai, dan tidak seorang pun yang dapat menulis dalam persoalan transaksi, maka sebagaimana

mestinya harus ada barang tanggungan yang dijadikan jaminan pinjaman atau dengan kata lain menggadaikan.

b. Hadist

Landasan hukum dalam gadai bisa ditinjau pula dalam perilaku Nabi Muhammad SAW, yang seketika waktu pernah melakukannya.

Hadist tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنُ
الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَا إِشَّةَ قَالَتْ: إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُدِيٍّ
طَعَامًا وَرَهْنُهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ
(رواه مسلم)

“Telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-Hamzaliy dan Ali bin Hasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amsyi dari Ibrahim dari Aswad dari A’isyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW, membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya”. (HR. Muslim).⁴

c. Ijmak

Ulama bersepakat terhadap sahnya dalam aktivitas gadai *rahn* tidak seorangpun dari mereka memperselisihkan mereka sahnya atau secara hukum Islamnya. meskipun mereka berselisih pendapat tentang hukum syariat di tempat kediaman (tidak dalam perjalanan). Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkannya gadai di tempat

⁴ Husain Muslim bin Hajjaj Al Kusyairy An Naisaburi, *Sahih Muslim*, juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1993), 51.

kediaman, sebagaimana disyariatkan dalam perjalanan karena Rasulullah SAW pernah melakukannya ketika tinggal di Madinah.

Dibatasinya gadai dalam perjalanan pada ayat di atas adalah untuk mengungkapkan sesuatu yang sering terjadi karena gadai sering kali terjadi dalam perjalanan. Sementara Mujahid, Dhahhak, dan para ulama Zahiriah berpendapat bahwa penggadaian tidak disyariatkan kecuali dalam perjalanan, dengan bersandar terhadap ayat di atas. Kemudian setelah itu pendapat mereka dibantah dengan landasan hadits Nabi Muhammad SAW di atas.⁵

3. Syarat dan Rukun Gadai

Syarat dan Rukun Gadai merupakan bagian terpenting yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan gadai. akad gadai atau perjanjiannya dipandang sah dan benar sesuai syariat Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun gadai yang telah ditentukan dalam hukum Islam.⁶ Syarat Gadai

Dalam pandangan Sayyid Sabiq, syarat gadai sama dengan syarat jual beli, gadai baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaiu:

- 1) Berakal;
- 2) Baligh;

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ..., 126.

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994), 309.

- 3) Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi akad gadai dan barang gadaian tersebut dapat diserahkan atau dipegang oleh *murtaḥin* ;
- 4) Barang yang dijadikanjaminan dapat berupa emas, berlian, dan benda-benda bergerak lainnya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, surat rumah).⁷

Dari syarat keempat di atas dapat dispesifikan kembali menjadi 2 bagian syarat sahnya gadai tersebut, sebagai berikut:

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, ..., 141.

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a) Harus dapat diperjualbelikan;
- b) Harus berupa harta yang bernilai;
- c) *Marhum* harus bisa dimanfaatkan secara syariah;
- d) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang diterima secara langsung;
- e) Harus memiliki oleh *rahn* (peminjaman atau pegadaian) setidaknya harus seizin pemiliknya.⁹

Salah satu syarat *marhum* adalah penguasaan *marhum* oleh *rahin*. Mengenai penguasaan barang yang digadaikan, ulama masih berselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat perlengkapan ataukah syarat sahnya gadai. Selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Bagi ahli fikih yang menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan akad gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan sudah dipaksa untuk menyerahkan barang kecuali bila penerima gadai tidak mau adanya penentuan demikian.¹⁰

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, ..., 108.

Shighat “*qdi* memerlukan tiga syarat:

- 3) *Marḥun* barang yang digadaikan)

Adapun jenis-jenis barang jaminan yang bisa digadaikan di pegadaian adalah:

- ¹² Ibid, 268.

¹³ Ibid, 293.

- c) Hutang harus jelas dan diketahui oleh *rahn* dan *murtahin*.¹⁷

Ulama' fikih sepakat mengatakan bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja, tanpa menghasilkan sama sekali, karena tindakan itu termasuk tindakan yang menyia-nyiakan

[illegible]

harta.¹⁸ dan para ulama mempunyai perbedaan mengenai pemanfaatan barang gadai:

a. Pemanfaatan Gadai oleh *raḥīn*

- 1) Mazhab Hanafiyah: dalam hal ini mengatakan barang gadai yang dilakukan oleh *raḥīn*. tidak boleh dimanfaatkan oleh pemberi gadai (*raḥīn*) kecuali atas izin penerima gadai (*murtaḥīn*).¹⁹ Apabila *raḥīn* mengambil manfaat dari barang gadai tanpa izin dari *murtaḥīn*, maka ia harus mengganti rugi senilai dengan yang telah ia gunakan karena dianggap telah menyalahi hak *murtaḥīn* yang berhubungan dengan hutang.
- 2) Mazhab malikiyah: berpendapat bahwa *raḥīn* tidak memiliki hak langsung untuk memanfaatkan barang gadai sekalipun mendapatkan izin dari *murtaḥīn*. Hal ini karena izin dari *murtaḥīn* berarti pembatalan terhadap akad gadai. karena manfaat barang gadai masih merupakan milik *raḥīn*. maka berhak mewakilkan pemanfaatannya pada *murtaḥīn* agar barang tersebut tidak sia-sia.²⁰
- 3) Mazhab Syafi'iyah: berpendapat bahwa orang yang menggadaikan dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. jika tidak menyebabkan barang gadai berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarai, menempati, dan lain-lain.

¹⁸ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 256.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, ..., 141.

²⁰ Wahhab Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, diterjemahkan oleh Ahmad Syahbari Salamon, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996), 224.

²² Ibid.

- dilakukan oleh *raḥin* sendiri. Akan tetapi, jika *marḥūm* dikuasai atau ditahan oleh *murtahin*, maka sebelum barang jaminan tersebut *raḥin* harus meminta izin *murtahin* untuk melakukan penjualan terhadap barang tersebut.
- 2) Jika *raḥin* tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh dan dia tidak mau menjual barang jaminannya maka berhak atau bahkan diharuskan memaksa *raḥin* untuk menjual barang jaminannya sebagai pelunasan hutang.²⁴
- d. Diserahkan barang jaminan kepada pemiliknya, menurut ulama' selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkan

dilakukan oleh *raḥin* sendiri. Akan tetapi, jika *marḥūm* dikuasai atau ditahan oleh *murtahin*, maka sebelum barang jaminan tersebut *raḥin* harus meminta izin *murtahin* untuk melakukan penjualan terhadap barang tersebut.

2) Jika *raḥin* tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh dan dia tidak mau menjual barang jaminannya maka berhak atau bahkan diharuskan memaksa *raḥin* untuk menjual barang jaminannya sebagai pelunasan hutang.²⁴

d. Diserahkan barang jaminan kepada pemiliknya, menurut ulama' selain Syafi'iyah, akad gadai berakhir karena diserahkan

1. Terbitnya Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah²⁶

Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). UU No. 3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan perluasan kewenangan tersebut, kini PA tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah saja, melainkan juga menangani permohonan pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, dan ekonomi syari'ah. Kaitannya dengan wewenang baru PA ini, dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

²⁶ Abdul Manan, "Informasi Tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung RI", Makalah, (Medan: Fakultas Syariah IAIN Sumetra Utara, 2007).

c. Melaksanakan kajian pustaka (library research) yang disesuaikan dengan pembagian empat kelompok di atas. Untuk melengkapi referensi, Tim KHES telah melakukan studi banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Pusat Takaful Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur pada tanggal 16-20 November 2006. Studi banding juga dilaksanakan ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional Islamabad, Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islam abad Pakistan, Bank Islam Pakistan dan beberapa lembaga keuangan syariah di Pakistan. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 25-27 Juni 2007.

[illegible]

- ## 2. Pemberlakuan Hukum Muamalat (KHES)

[illegible]

²⁹ A. Qadri, *Eksistensialisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cct. 1, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 172-173.

³⁰ Abdul Mughit, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Islam”,..., 147.

³¹ Syamsul Anwar, "Mazhab Sejarah dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Hukum Islam" dalam Ainurrofik (ed.), "*Mazhab*" *Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Cet. 1, (Yogyakarta: Penerbit ar-Ruzz Press, 2002), 152.

[illegible]

3. KHES Sebagai Fiqih Ke-Indonesia-an

³³ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. 1973. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Jail. III: 14. Bandingkan dengan Nasrun Rusli. 1420/1999. *Konsep Ijtihad asy-Syaukani, Relevansinya bagi Perubahan Hukum Islam di Indonesia*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu. hlm. 101.

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 2.

Secara garis besar, unsur-unsur dalam definisi fiqh ini adalah:

- Dari uraian term fiqh di atas, maka KHES dapat dikategorikan sebagai produk pemikiran fiqh karena mencakup empat unsur di atas, yaitu berisi tentang hukum Islam (Syari'at); hukum tersebut tentang perbuatan mukallaf yang bersifat konkret; bahwa hukum tersebut digali dengan menggunakan metode ijtihad dan istidlal; dan hukum praktis itu digali dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan rasio (ra'y). Hal ini sekaligus menegaskan bahwa secara umum fiqh itu bersifat

³⁷ Muhammad Hasan Qasim. *Al-Mujaz Fi 'Aqd al-Bal*. (Iskandariyyah: Dar al-Jami'ah al-Jadidah, 1996), 59-62.

Yang dimaksud sumber-sumber hukum di sini adalah sumber hukum Islam dan sumber lainnya yang dijadikan rujukan dalam penyusunan KHES. Sebagaimana dimaklumi, bahwa sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) sumber-sumber hukum yang disepakati (masadir al-ahkam al-muttafaq 'alaiha) atau sering disebut sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas; dan (2) sumber-sumber hukum yang diperselisihkan (masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha), yaitu Istihsan, Istislah (al-Maslahah al-Mursalah), Zara'i', 'Urf, Istishab, Mazhab Sahabi, Syar'un Man Qablana, dan Dalalah al-Iqtiran. Dalam penyusunan KHES, nampak sekali telah merujuk ke banyak sumber, di samping sumber-sumber pokok juga sumber-sumber pendukung. Perujukan kepada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dapat dilihat secara general dari ketentuan-ketentuan tentang harta, akad, jual beli, jual beli salam, dll. sudah cukup menunjukkan kepadanya. Adapun perujukan terhadap sumber-sumber yang diperselisihkan, dapat dilihat dari kasus perkasus. Dalam penggunaan dalil istihsan dapat dilihat dari kebolehan jual beli pesanan (bai' as-salam) dan istisna', meskipun hal itu pernah dipraktekkan pada

masa sahabat. Dalil maslahat atau istislah, 'urf juga sudah banyak mewarnai dalam pasal-pasal KHES.

Pada dasarnya, KHES mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam yang sudah populer, dari sumber-sumber primer sampai sumber-sumber skunder. Artinya dalam perspektif fiqh mazhab, KHES telah mengakomodir dari semua mazhab yang mempunyai metode istidlal yang berbeda-beda. Meskipun dalam wilayah ibadah mayoritas umat Islam nusantara, bahkan Asia Tenggara menganut mazhab Syafi'i³⁸ tetapi dalam urusan muamalat cenderung berwarna eklektik. Kalau disadari banyak sekali praktek muamalat oleh umat Islam Indonesia ini yang mengacu kepada mazhab atau dalil yang lebih longgar, seperti mazhab Hanafi, Maliki dan ulama Hanabilah (bukan Imam Ahmad-nya), meskipun dalam urusan ibadah mengikuti misalnya mazhab Syafi'i yang cenderung "rigit" dan terkenal metode ihtiyat-nya. Sehingga penyusunan KHES dapat disebut sebagai media refleksi fiqh mazhab dan metodologi hukum Islam untuk konteks ke-Indonesia-an. Secara metodologis (usuli), talfiq (eklektik) dalam istidlal atau dalam mazhab fiqh itu dibenarkan jika dalam konteks memilih dalil (istidlal) yang lebih kuat. Yang tidak boleh adalah jika talfiq itu dilakukan dengan alasan mencari format hukum yang paling mudah dan sesuai dengan kepentingannya.³⁹

³⁸ Isnawati Rais. “Pemikiran Fikih Abdul Hamid Hakim (Suatu Studi tentang Pengembangan Hukum Islam di Indonesia)”. (Jakarta--Disertasi Doktor PPS IAIN Syarif Hidayatullah, 1999), 5.

³⁹ Abdul Mughit. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ..., 154.

wilayah 5,9 km dengan total jumlah penduduk di desa tersebut sebanyak 2054 jiwa.

Adapun mata pencaharian masyarakat desa Larangan Glintong 70% bermata pencaharian di bidang pertanian, 20% bermata pencaharian sebagai pedagang, dan 10% di bidang lainnya. dengan adanya rincian persentase dari segi pencaharian masyarakat Klampis bisa disimpulkan bahwa taraf kehidupan mereka 25% tergolong kaya, 25% tergolong sedang, dan 50% tergolong miskin. Hal ini sesuai dengan data luas tanah bengkok (Ha) menurut desa/kelurahan di Kecamatan Klampis tahun 2020, dimana terdapat 22 desa/kelurahan dengan jumlah sawah seluas 87,3 Ha dan tegal seluas 37,9 Ha.³

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat berperan bagi kehidupan para regenerasi penerus bangsa untuk terciptanya bangsa yang berpendidikan dan berkemajuan. Semua warga negara indonesia ber hak akan pendidikan yang layak di dapatkan oleh mereka. Maka dari itu, pemerintah desa Larangan Glintong dari tahun ke tahun bersama-sama memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang ada.

Di desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan ini ada beberapa instansi pendidikan, dengan adanya beberapa instansi pendidikan ini tidak lain bertujuan untuk menerapkan aturan

³ Ibid

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa instansi pendidikan masyarakat desa Larangan Glintong mempunyai sarana pendidikan yang cukup mumpuni guna menciptakan pemuda pemudi yang melek intelektual dan memperluas pengetahuannya serta bisa ahlakul karimah. Instansi pendidikan yang ada di desa Larangan Glintong ini sudah jelas tidak mempunyai lembaga pendidikan pondok pesantren dan sekolah tinggi. Maka dari itu sebagian warga yang ingin memperdalam pengetahuan perihal keagamaan biasanya para orang tua mengantarkan putra putrinya ke pondok pesantren diluar kecamatan bahkan hingga ke kota Bangkalan sendiri. Begitu pun bagi yang ingin melanjutkan ke sekolah tinggi mereka terpaksa meninggalkan desanya dan lebih memilih merantau ke kota demi melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

[illegible]

lainnya. Dalam hal ini tidak memandang suatu kalangan, mulai dari remaja hingga bapak-bapak/ibu-ibu pun juga ikut serta.

Dalam perihal gotong royong saling bantu tidak hanya ketika ada suatu acara, melainkan ketika salah satu dari mereka yang kebetulan tertimpa suatu musibah pun mereka tetap antusias saling bantu membantu satu sama lain, maka dari itu soal kedekatan emosional antara warga desa sudah tidak diragukan lagi.

Keantusiasan masyarakat desa Glintong di bidang ritual keagamaan masih terlihat, sebuah adat tradisi masyarakat disana masih berjalan dengan baik dan konsistensi para warga pun tidak diragukan lagi dalam menjaga dan melestarikan budaya yang telah ada di desanya. Ada sebuah tradisi ritual keagamaan di desa Glintong yang biasa dikenal dengan sebutan “yasinan” yang terlaksana setiap minggu 1 kali. Pada kegiatan ini di desa Glintong terbagi 2 kelompok yakni perempuan dan laki-laki, untuk waktu pelaksanaan pun berbeda, untuk laki-laki (lake'an) dilaksanakan setiap jumat malam sedangkan untuk yang perempuan (Bine'an) dilaksanakan setiap kamis malam. Kegiatan ini dikenakan biaya iuran se ikhlasnya setiap kali pertemuan, namun biasanya bagi kelompok perempuan (Bine'an) membayar iuran Rp. 10.000 setiap orangnya, sedangkan bagi kelompok laki-laki (lake'an) pun seikhlasnya namun mereka biasanya rata-rata membayar Rp. 5.000. per orang. Untuk perihal

tempat tiap kali pertemuan berpindah pindah dari kediaman anggota satu ke kediaman anggota lainnya.⁵

Dari uang terkumpulnya iuran dari para anggota “yasinan” baik kelompok laki-laki (Lake'an) ataupun perempuan (Bine'an) akan dikasihkan ke tuan rumah untuk pertemuan selanjutnya yang akan digunakan sebagai biaya konsumsi di setiap kali pertemuannya. Namun apabila ada sisa dari uang iuran anggota tersebut maka akan dimasukkan ke kas “yasinan”.

Adapun aktifitas ritual keagamaan tradisi masyarakat desa Glintong rutin bulanan, masyarakat desa biasa menyebutnya kegiatan ini dengan sebutan “Rebbe”. Gambaran sedikit tentang tradisi bulanan “rebbe” ini ialah tidak lain se istilah dengan selamatan setiap mengawali awal bulan hijriyah dengan mengantarkan makanan kepada tetangga sekitar. Makanan yang dibagi-bagikan kepada tetangga sekitar merupakan jenis makanan khas warga Kecamatan Klampis, biasanya berupa jenis bubur dan nasi tumpeng. Masyarakat desa Glintong menetapkan penetapan kegiatan “rebbe” ini dengan berpatokan pada kalender hijriyah, namun hanya ada 3 bulan hijriyah yang di peringati dengan tradisi rebbe ini, yakni setiap awal Muharrom, safar dan Sya’ban. Untuk bulan muharrom di peringati dengan “Tajin peddis”, bulan safar “Tajin manes”, dan bulan Sya’ban di peringati dengan “Lasor” (Tumpengan). Bagi setiap warga Kegiatan ini sifatnya Tidak wajib, dan tidak mengikat. Karna ketika

⁵ Bpk. Muzammil, *Wawancara*, Desa Larangan Glintong, 06 April 2021.

Mayoritas penduduk desa Larangan Glintong bekerja sebagai seorang petani dan buruh tani. Berdasarkan pemaparan sekretaris desa, saat ini 80% penduduk desa Larangan Glintong bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi tanah yang subur ketika musim hujan masyarakat menanam ladangnya dengan tanaman padi. Masyarakat banyak yang membuat tempat untuk menampung air seperti kolam yang digunakan untuk mengairi sawah ketika musim kemarau tiba. Ketika musim kemarau banyak yang menanam jagung karena tidak memerlukan banyak perairan.

Gadai atau *rahj'n* merupakan transaksi tukar menukar barang yang disertakan barang jaminan bagi peminjam kepada yang meminjamkan, hal

ini terjadi di masyarakat desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan. Transaksi Gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan atau keperluan masyarakat, sehingga terjadi hubungan yang saling melengkapi antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya gadai tersebut di dalam kehidupan masyarakat, bisa membantu kebutuhan masyarakat yang belum bisa terpenuhi.

Di dalam proses gadai ini penggadai dan penerima gadai wajib melakukan akad terlebih dahulu. Karena tanpa adanya suatu akad penggadaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad di dalam penggadaian ialah rukun yang pertama yang harus dilakukan sebelum penggadaian. Selain akad tersebut syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh penggadai dan penerima gadai sebelum melakukan penggadaian.

Adanya penggadaian ini dilakukan antara penggadai dan penerima gadai yang sudah melakukan kesepakatan di awal, dimana penggadai memberikan harga barang miliknya misalnya seharga Rp.3.000,000.- maka pihak penerima gadai akan memberikan uang yang telah ditentukan oleh penggadai. Dengan adanya penggadaian ini penggadai dan penerima gadai sama-sama mendapat keuntungan, dimana keuntungan tersebut penggadai menerima uang dan penerima gadai menerima barang yang sudah digadaikan oleh penggadai.

Beberapa hal akan disajikan pemaparan yang lebih jelas oleh penulis dalam pembahasan berikut ini:

Pekerjaan : Petani

b. Pihak Kedua (Pemberi Hutang)

Nama : Makmor

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal lahir : Bangkalan, 01 Juli 1947

Alamat : Dusun Glintong Dajah, Desa Larangan
Glintong, Klampis, Bangkalan

Pekerjaan : Petani

Deskripsi Objek

Jenis lahan yang digadaikan berupa sawah dengan ukuran panjang 24 m³, lebar: 12 m³, dan luas = 288 m³. Lahan sawah seluas kurang lebih 288 m³ yang dimiliki oleh Pak Monir salah satu warga Kmp. Glintong Dajah, Desa Larangan Glintong, Klampis Bangkalan ini ditanami tanaman berbagai jenis sesuai dengan musim, antara lain jenis tanaman yang ditanami adalah jagung, padi, dan kacang tanah. Pada umumnya di desa Larangan Glintong ini para warga mayoritas yang mempunyai lahan sawah tidak hanya menanam jenis tanaman yang ditanam oleh Pak Monir. Selain Jagung padi dan kacang tanah, ada pula jenis tanaman yang lainnya. Dalam hal menanam tanaman masyarakat Larangan Glintong juga banyak memanfaatkan ladang untuk menanam jenis tanaman kacang hijau, kacang panjang, dan berbagai jenis ubi.

Masyarakat Glintong pada umumnya tanman jenis padi ditanami hanya sekali per tahun dengan setiap 4 bulan panen, sembari menunggu musim masyarakat Larangan Glintong melakukan tumpang sari dengan menanam kacang tanah dan jagung pasca panen padi selama 8 bulan dalam hitungan 2 kali panen. Tapi tidak menutup kemungkinan, ada kalanya jadwal penanaman akan berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi cuaca yang ada pada saat itu, seperti contoh pada tahun ini tepatnya tahun 2021 dengan cuaca pancaroba. Pada saat itu juga pasca panen padi pada pertengahan maret dan ternyata musim hujan pun datang lagi, maka masyarakat langsung menanam padi lagi selama 4 bulan kedepan. Jadi untuk tahun 2021 ini masyarakat desa Larangan Glintong panen padi sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 8 bulan di tahun ini, dan pasca itu sisa 4 bulannya akan ditanami kacang tanah sebagai tumpang sari lahan sawah.

⁶ Bpk. Monir, *Wawancara*, Desa Larangan Glintong, 07 April 2021.

C. Mekanisme Praktik Gadai Sawah Di Desa Larangan Glintong

⁷ Bpk. Siroj Nawawi, *Wawancara*, Desa Larangan Glintong, 07 April 2021.

Transaksi gadai ini diawali dengan perjanjian hutang piutang. Pada kali ini Pak Monir (penerima hutang) lagi membutuhkan uang dan seketika itu juga menemui Pak Makmor (pemberi hutang) di kediaman Pak Makmor. Pak Monir memilih Pak Makmor untuk menjaminkan sawahnya dan melakukan hutang piutang dengannya, mungkin karena Pak Makmor merupakan salah satu keluarga yang cukup mampu dan bisa di percayakan atas jaminan sawah yang dimiliki Pak Monir. Pak Makmor adalah salah satu warga satu dusun dengan Pak Monir, kebetulan mereka rumahnya berdekatan sehingga saling bisa menaruh kepercayaan penuh atas kedua belah pihak tersebut. Perjanjian kedua belah pihak tersebut dilakukan secara lisan dan tatap muka langsung juga perjanjian ini tidak tertulis namun untuk nominal dan jangka waktu mereka kedua belah pihak saling sepakat, tidak ada saksi dalam akad ini, mereka melakukan kesepakatan atas dasar kepercayaan dan asas persaudaraan antara kedua belah pihak.

Lebih jelasnya kedua belah pihak merupakan tetangga kemudian melakukan transaksi gadai sawah. Pak Makmor selaku pemberi hutang meminjamkan uang sebesar Rp. 50.000.000.- dalam jangka waktu 3 tahun yang dimulai sejak 2019 dan 2022 akad itu harus berakhir dikarenakan sudah jatuh tempo sesuai dalam kesepakatan berdua. Biaya perawatan ditanggung pemberi hutang, dan hasilnya pun 100% dimanfaatkan oleh pemberi gadai hutang, pemilik sawah (penerima hutang) tidak bisa menikmati 1% pun hasil dari pengelolaan sawah tersebut.

BAB IV

A. Praktik Gadaai Sawah di Desa Larangan Glintong Klampis Bangkalan

Praktik gadai di desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Bangkalan, merupakan hal yang sangat lazim dilakukan oleh masyarakat disana, mungkin setiap manusia juga melakukan demikian, karena tidaklah mungkin apabila setiap manusia terlepas dari beban hutang atau praktik gadai tersebut. Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Larangan ini ialah sebuah sawah yang digadaikan sebagai bentuk jaminan si pemberi gadai kepada penerima gadai.

Praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Larangan glintong ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut, sehingga dalam kebiasaannya terkadang terjadi ketidaksinambungan terhadap kesepakatannya yang telah dibangun sebelum-sebelumnya, sehingga potensi hal demikian akan ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

Lebih jelas, praktik gadai ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Larangan glintong, sehingga timbul berbagai macam dampak dari awal perjanjiannya yang mana dalam praktiknya memanfaatkan barang jaminan gadai. Dalam praktik gadai tersebut, pemberi gadai dan penerima gadai harusnya melakukan kesepakatan atau perjanjian gadai (akad gadai) dan harus pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh keduanya, apabila dari pemberi dan penerima sudah berakad atau melakukan kesepakatan maka secara otomatis ada perjanjian antara keduanya pemberi gadai dan

Ketika sudah sepakat atas ketentuan-ketentuan dari kedua belah pihak, maka jaminan atau barang yang dimiliki oleh pemberi harus diserahkan kepada penerima sebagai pemberi hutang pada sang pemberi barang. Namun ketentuan barang jaminan yang akan dipindah alihkan haruslah bernilai ekonomis ataupun memiliki harga jual, sehingga penerima gadai dapat percaya bahwa barang tersebut bisa bernilai ekonomis atau sebanding dengan timbal balik bagi penerima barang yang akan memberikan pinjaman.

Proses gadai pada umumnya dilakukan oleh masyarakat hanya untuk kebutuhan pada pribadi maupun keluarga. Salah satunya masyarakat desa Larangan yang ingin melakukan penggadaian suatu barang kepada pihak lain. Pemberi gadai tersebut mendatangi orang yang mau menerima gadainya, dan apabila orang tersebut dapat menerima gadai tersebut, dengan itu kedua belah pihak akan membuat perjanjian gadai. Metode pembayaran

[illegible]

yang dilakukan masyarakat desa Larangan Glintong pihak peminjam akan melunasi hutangnya dan kembali mengambil haknya atas penguasaan penuh barang jaminan tersebut seperti awal sebelum terjadinya transaksi gadai. Dan jika peminjam belum mampu melunasi hutangnya dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh kedua pihak maka pihak pemberi hutang akan memanfaatkan objek gadai sampai pihak peminjam mampu melunasi hutangnya. Inilah termasuk salah satu bentuk toleran masyarakat adat desa, pihak pemberi hutang tidak mempunyai hak kepemilikan penuh atau mengklaim objek gadai itu miliknya meskipun pada waktu jatuh tempo pihak peminjam belum mampu melunasi hutangnya. Namun apabila pihak peminjam benar-benar tidak mampu melunasinya biasanya masyarakat desa pada umumnya peminjam akan menjual barang jaminan tersebut kepada pihak pemberi hutang dengan harga jual yang ditentukan pemilik barang (pemberi gadai).

Pemanfaatan barang gadai yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat desa larangan Glintong kecamatan Klampis kabupaten Bangkalan ini terjadi ketika barang gadai sudah pindah tangan dari pemilik barang kepada pemberi hutang. Pemanfaatan barang gadai yang dimaksud disini dengan memanfaatkan objek gadai yang berupa sawah yang nantinya akan dimanfaatkan dan dikelola oleh pihak penerima gadai (pemberi hutang) walaupun tanpa izin atau melakukan kesepakatan terlebih dahulu atas pemanfaatan barang gadai. Karna pada umumnya yang terjadi di desa larangan Glintong sudah menjadi kebiasaan maka dari itu hal tersebut menjadi hal yang sangat lazim dilakukan pada saat melakukan transaksi

[illegible]

- B. Analisis Hukum Islam dan KHER Terhadap Praktik Gadai sawah di Desa Larangan Glintong, Kec. Klampis, Kab. Bangkalan**

Praktik Gadai di Desa Larangan Glintong Kec. Klampis Kab. Bangkalan, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Larangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi. Praktik gadai lumrahnya dipahami sebagai pinjam meminjam atas sebuah barang yang diberikan sebagai jaminan yang kemudian ditukar dengan uang dalam bentuk timbal balik atas penyerahan jaminan barang oleh sang pemberi. Objek barang jaminan yang dimiliki oleh masyarakat larangan yaitu sawah sebagai transaksi jaminan hutangnya dan dominan masyarakat larangan bekerja sebagai petani sawah.

[illegible]

Dari hasil penelitian penulis dalam praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan diketahui bahwa rukun dan syarat-syaratnya mendekati kebenaran menurut hukum Islam, walaupun terkadang sebagian masyarakat yang melakukan gadai sawah tersebut ada sedikit kesamaran pada akadnya.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

Dan hadist dari Aisyah r.a:

“Dari Aisyah r.a. berkata, bahwa sesungguhnya Nabi SAW, membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran ditangguhkan dengan menggadaikan baju besinya”.(HR. bukhari:1962)²

Dilihat dari firman Allah SWT dan hadis diatas sudah jelas bahwa gadai itu diperbolehkan dalam Islam. Namun yang perlu mendapat penelitian disini adalah bahwa pelaksanaan gadai haruslah dilihat dan dilaksanakan dalam suatu kegiatan yang bebas dari unsur penipuan, dan saling merugikan.

Dalam soal pelaksanaan gadai tentunya harus memenuhi beberapa ketentuan-ketentuan, yang dalam hal ini memahami rukun gadai dan syarat gadai agar supaya dalam praktiknya sah dan dapat dijalankan dengan baik. Rukun gadai (*rahn*) adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh *raḥin* sebagai pemberi gadai dengan *murtaḥin*, karena jika tidak melewati ketentuan-ketentuan rukun gadai maka gadai yang dilakukan akan batal dan tidak sah. Ketentuan rukun gadai diantaranya ialah: lafal ijab dan qabul (*sighat*), orang yang berakad (*raḥin* dan *murtaḥin*), harta yang dijadikan jaminan (*marḥun*) uang pinjaman (*marḥun bih*).³ Begitu pula syarat gadai, orang yang melakukan kegiatan gadai harus cakap hukum, adanya *sighat* (lafal) sebuah ucapan yang bersamaan dengan syarat tertentu, adanya *marḥun bih* (uang pinjaman).⁴

Dari perbedaan pendapat para ulama diatas dapat diambil kesimpulan bahwa membiarkan barang gadai (*marhun*) terlantar itu dapat merusak atau mengurangi nilai materiil dari dari barang gadai itu sendiri, dan status *marhun* tetap milik *rahin*, sementara *murtahin* hanya mempunyai hak menahan barang gadai sebagai jaminan utang. Akad gadai hanya sebagai jaminan atas suatu hutang, bukan akad pemindahan hak milik. Maka dari itu hak milik atas suatu manfaat dari barang gadai (*marhun*) yang dijadikan sebagai suatu jaminan berada dipihak *rahin* (penggadai), sedangkan *murtahin* (penerima gadai) tidak boleh

⁶ Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madhhab*, terjemah: Chatibul Umam (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), 277-285.

Sedangkan praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan ini, menurut hasil penelitian penulis di lapangan, bahwa pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tersebut tidak membagikan hasil keuntungan pemanfaatannya terhadap pemberi gadai (*raḥin*), sehingga pemberi gadai merasa dirugikan. Tetapi, dari pemanfaatan tersebut pihak penerima gadai bertanggung jawab atas biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai tersebut.

Dalam pemanfaatan atas barang gadai yang dijalankan. Para Ulama berbeda pendapat. Hal ini Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hasil pemanfaatan barang gadai yang dipegang oleh *murtahin* sebagai penerima, itu adalah hak si pemberi gadai selama *murtahin* (penerima gadai) tidak mensyaratkannya. Sedang menurut Ulama Syafi'iyah,

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّيْرُؤًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمِ الْمُضْعِفُونَ

Ayat di atas menjelaskan suatu keuntungan tambahan dari jumlah awal pinjaman atas kegiatan hutang piutang. Hal demikian sama halnya dengan pemanfaatan atau pengambilan keuntungan dari barang gadai. Dalam firman Allah ditegaskan bahwa harta yang diperoleh dengan cara seperti halnya *riba* (tambahan), tidak akan bertambah di sisi Allah swt. Dan akan menjadi sebuah beban bagi dirinya. Jadi semua transaksi utang piutang dengan adanya sebuah tambahan atau keuntungan itu disebut *riba*. Dalam hal ini keuntungan yang dimaksud ialah dari semua keuntungan. Maka dari itu kita harus memahami hal-hal yang berbau *riba*, agar kita tidak menjadi makhluk yang jauh dari tuhan.

Kegiatan praktik gadai di Desa Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan ini, sebagaimana persoalan ini dilanda Bapak Monir dan Bapak Makmor, gadai yang berupa sawah tersebut di dimanfaatkan oleh Bapak si penerima, pemanfaatan tersebut tidak secara lengkap disebutkan

[illegible]

2. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

- Adanya orang yang berakad (*aqid*);
- Pemberi gadai (*raḥin*) dan penerima gadai (*murtaḥin*);
- Adanya barang jaminan (*marḥun*);
- Adanya hutang (*marḥun bih*);
- Akad/Ijab dan qabul.

Hukum atau aturan dalam pemanfaatan barang gadai, juga sudah diatur dalam KHES, sebagaimana terdapat di pasal 396 dengan menyebutkan bahwa "murtaḥin tidak boleh memanfaatkan barang gadai (marḥun) tanpa mendapatkan izin dari raḥin". ketentuan tersebut telah jelas disebutkan bahwa untuk pemanfaatan barang gadai hendaknya harus mendapatkan izin dari pemberi gadai, namun apabila tidak ada kesepakatan atau izin dalam pemanfaatan barang gadai tersebut maka tentu jelas bahwa tidak sah dalam praktik gadai tersebut, karena ketentuan demikian tidak jauh berbeda dengan pendapat para Ulama sebelumnya.

[illegible]

Jadi praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, menurut Pasal 396 KHES. bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak boleh dilakukan karena tidak ada izin dari pemberi gadai, walaupun hal demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tetap tidak boleh dilakukan karena sudah sesuai hukum yang berlaku.

Antara tinjauan Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, terdapat persamaan ketentuan dalam menjalankan praktik gadai, persamaan tersebut yakni ada pada rukun dan syarat dalam gadai. Artinya dari tinjauan Hukum Islam dan KHES ini, sama-sama memiliki perspektif tinjauan atau bahan analisis untuk persoalan praktik gadai. Jadi, dalam

ranah kali ini, penerima gadai hendaknya memperoleh izin dari pemilik barang apabila ingin memanfaatkan barang gadai si pemberi, karena hal demikian untuk meminimalisasi pola pikir masyarakat yang kemudian menjadi kebiasaan dalam pemanfaatan barang gadai dengan tidak memperoleh izin dari si Pemilik atau pemberi gadai.

Perbedaan antara Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yakni KHES membahas lebih spesifik mengenai permasalahan ekonomi syariah, namun ada persamaan terdapat dalam dasar hukum yang digunakan sebagaimana perspektif Hukum Islam menggunakan dasar Al- Qur'an, Hadist, dan pendapat para Ulama. Sedangkan, pisau analisis dalam KHES, penulis mengambil pasal 396 yang menerangkan tentang pemanfaatan barang gadai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, sudah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang dapat ditinjau dari hukum Islam, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa praktik gadai yang dilakukan sudah pandang sah karena jelas, adanya pihak yang bertransaksi yakni pemberi gadai dan penerima gadai (*"qid*), adanya ijab dan qabul, adanya barang yang akan dijadikan jaminan hutang yang memiliki nilai jual dan nilai tukar pengganti barang.
2. Disebutkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, praktik gadai Masyarakat Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan ini, tidak sah karena dalam akadnya tidak memenuhi syarat *sighat*, yakni transparansi dalam *sighat* yang kurang jelas, dan juga pada pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh penerima gadai tidak diperbolehkan karena mengandung unsur riba.

Namun menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang terdapat pada Pasal 396, bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai tidak boleh dilakukan karena tidak ada izin dari pemberi gadai, walaupun hal demikian sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tetap tidak boleh dilakukan sebagaimana sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Penulis berharap segala tindakan yang dilakukan masyarakat umum, untuk bagaimana tidak sekali-kali tidak taat hukum dan sepatutnya sama-sama hukum atau aturan yang berlaku, khususnya masyarakat Desa Larangan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, agar tidak lagi melakukan pelanggaran hukum seperti pemanfaatan barang gadai yang tanpa izin pemilik barang gadai.
2. Penulis juga menyarankan agar dapat pula memahami bagaimana menjalankan praktik gadai tersebut diseimbangi dengan hukum atau syariat Islam.

- Hasanah Hasyim. *Tehnik-tehnik observasi, sebuah alternative metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu social*. Jurnal-jurnal dakwah UIN Semarang, 2012.
- Heriono Novi. Praktik Gadai di Desa Morosunggingan Kabupaten Jombang menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Hidayati Dina Amaliya. *Pemanfaatan gadai tanah sawah di desan Sruwen, kec, Tenganan, kab. Semarang menurut hukum islam*. Skripsi-IAIN Salatiga, 2016.
- Husain Muslim bin Hajjaj Al Kusyairy An Naisaburi. *Sahih Muslim*, juz 2, Beirut: Dar Al-Fikr, 1993.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. 1973. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Jail. III: 14. Bandingkan dengan Nasrun Rusli. 1420/1999. Konsep Ijtihad asy-Syaukani, Relevansinya bagi Perubahan Hukum Islam di Indonesia. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Ilmi Idrus Nurul. “ETNOSIA *Jurnal Etnografi Indonesia*”, *Jurnal Etnosia*, Vol. 01. No. 02, Desember, 2016.
- Imam Zainudin Achmad bin Al-Lathief Az-Zabidi. *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah: Achmad Zaidun, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- Kiftiyah Mamlu'atul. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Lailiyah Kholisatul. *Studi komparatif fatwa MUI dengan kitab Fathul Mu'in terhadap masalah pemanfaatan sistem gadai di desa Sansingrowo kecamatan Soko kabupaten Tuban*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Mafazan Daih Akhidzu. Pemanfaatan barang jaminan tanah oleh penerima gadai dalam perjanjian hutang piutang perspektif Fiqih empat mazhab. Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Manan Abdul. “Informasi Tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Mahkamah Agung RI”, Makalah. Medan: Fakultas Syariah IAIN Sumatra Utara, 2007.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2013.
- Mas'adi Gufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Monir. (Warga Desa Larangan glintong) *Wawancara*. Desa Larangan glintong, 06 April 2021.
- Mughit Abdul. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Islam”, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII, 2008.
- Mulyana Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muslich Ahmad Wardi. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Muzammil. (Warga Desa Larangan glintong) *Wawancara*. Desa Larangan glintong, 06 April 2021.
- Narbuko Chalid dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nawawi Ibnu. (Warga Klampis Timur) *wawancara*, Desa Klampis Timur Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, 27 -11-2020.
- Nawawi Ismail. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi Siroj. (Warga Desa Larangan Glintong) *wawancara*, Desa Larangan Glintong Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, 28 -11-2020.
- Ningtias Winda Fitri Ayu . *Analisis hukum Islam terhadap Gadai Uang Kuno: studi kasus di Gadai Murah Jogja, Kelurahan Gatak, Kecamatan Bantul*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Praswoto Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Qadri. *Eksistensialisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Cet. 1. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Qasim Muhammad Hasan. *Al-Mujaz Fi ‘Aqd al-Bal*. Iskandariyyah: Dar al-Jami‘ah al-Jadidah, 1996.
- Rais Isnawati. *Pemikiran Fikih Abdul Hamid Hakim (Suatu Studi tentang Pengembangan Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta--Disertasi Doktor PPS IAIN Syarif Hidayatullah, 1999.
- Rustam. *pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum islam*. Skripsi-UIN Alauddin Makassar, 2011.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah 12*. Jakarta: Pustaka Percetakan Offset, 1998.
- Sabiq Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sanusi Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Subendi Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabetta, 2012.
- Sulaiman Rasyid. *Fiqh Islam*. Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Syafi'I Rahmat. *Fiqh Muammalah*. Cet. 3. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Tamwif Irfan. *Metotologi penelitian*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Wahhab Khallaf Abdul. *kaidah-kaidah hukum islam (ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Yanti Erna. *Tinjauan hukum islam terhadap sistem gadai tanah di kec. Tawamangu*. Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Yaqin Ainul. *fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Pamekasan : Duta Media, 2018.
- Yazid Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyas, 2016.
- Yusuf Muri, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, & penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Zein M. Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh, Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Zuhaili Wahhab. *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Diterjemahkan oleh : Ahmad Syahbari Salamon. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1996.
- Zuhdi Masyfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1997.